



COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN TERAS CIHAMPELAS DI KOTA BANDUNG

Darell Faris Natiq Bardana¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan Teras Cihampelas di Kota Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan ruang publik, yang berdampak pada menurunnya fungsi Teras Cihampelas sebagai kawasan wisata dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Permasalahan tersebut terlihat dari lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah, keterlibatan pelaku usaha yang belum maksimal, serta minimnya peran sektor swasta, akademisi, dan media. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan Teras Cihampelas di Kota Bandung. Kerangka teori yang digunakan adalah *Collaborative Governance Regime* (CGR) dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh yang meliputi dinamika kolaborasi, tindakan kolaboratif, serta dampak dan adaptasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian berasal dari unsur pentahelix, yaitu pemerintah, pelaku usaha atau PKL, koperasi, akademisi, dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi belum berjalan optimal, tindakan kolaboratif masih bersifat sektoral, serta dampak dan adaptasi kolaborasi belum signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan Teras Cihampelas belum efektif dan memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor serta forum kolaboratif yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Collaborative Governance*, Teras Cihampelas, Pentahelix, Pengelolaan Ruang Publik

Abstract

This study examines the implementation of collaborative governance in the management of Teras Cihampelas in Bandung City. The study is motivated by the suboptimal collaboration among stakeholders in managing public spaces, which has led to a decline in the function of Teras Cihampelas as a tourism area and a center of community economic activities. These issues are reflected in weak coordination among local government agencies, limited involvement of business actors, and the minimal role of the private sector, academics, and the media. This study aims to describe and analyze the implementation of collaborative governance in the management of Teras Cihampelas using the Collaborative Governance Regime (CGR) framework proposed by Emerson,

Nabatchi, and Balogh, which includes collaborative dynamics, collaborative actions, as well as impacts and adaptation. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through literature review, observation, interviews, and documentation. Informants were drawn from the pentahelix elements, namely government, business actors or street vendors, cooperatives, academics, and the media. The findings indicate that collaborative dynamics have not been optimally implemented, collaborative actions remain sectoral, and the impacts and adaptation of collaboration are still insignificant. This study concludes that the implementation of collaborative governance in managing Teras Cihampelas has not been effective and requires strengthened cross-sector coordination and sustainable collaborative forums.

Keywords: Collaborative Governance, Teras Cihampelas, Pentahelix, Public Space Management.

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh percepatan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi telah membawa perubahan besar terhadap tuntutan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat tidak lagi memandang negara semata sebagai penyedia layanan publik, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif dalam proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Perubahan ini mendorong perlunya pembaharuan cara pandang dalam tata kelola pemerintahan, khususnya terkait bagaimana kebijakan dirancang serta siapa saja aktor yang terlibat dalam proses tersebut.

Dalam konteks pemerintahan modern, negara tidak lagi dapat berperan sebagai satu-satunya aktor dalam pengambilan keputusan publik. Kompleksitas permasalahan masyarakat menuntut adanya kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun sektor non-pemerintah lainnya. Pendekatan collaborative governance kemudian muncul sebagai kerangka tata kelola yang menekankan proses pengambilan keputusan bersama, kesetaraan peran, kepercayaan antaraktor, serta tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan kebijakan publik.

Kolaborasi dalam collaborative governance tidak hanya dipahami sebagai pembagian peran administratif, melainkan sebagai proses dialogis yang memungkinkan seluruh aktor duduk bersama, saling mendengarkan, membangun kepercayaan, dan mengambil keputusan secara kolektif. Namun

demikian, praktik tata kelola kolaboratif tidak selalu berjalan ideal. Banyak kebijakan publik yang secara formal melibatkan aktor non-pemerintah, tetapi tidak memberikan ruang partisipasi yang substansial. Akibatnya, kebijakan dan program yang dihasilkan sering kali tidak berjalan optimal dan gagal menjawab kebutuhan masyarakat.

Permasalahan tersebut banyak ditemukan dalam pengelolaan ruang publik perkotaan. Ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai hasil pembangunan fisik, tetapi juga sebagai ruang sosial yang hidup dan membutuhkan pengelolaan bersama agar dapat berkelanjutan. Pemerintah sering kali bertindak sebagai inisiator utama pembangunan ruang publik tanpa diiringi oleh sistem kolaborasi yang kuat dalam pengelolaannya. Kondisi ini menyebabkan ruang publik rentan mengalami penurunan fungsi ketika tidak didukung oleh keterlibatan aktif para pemangku kepentingan.

Salah satu contoh pengelolaan ruang publik yang menghadapi tantangan kolaborasi adalah Teras Cihampelas di Kota Bandung. Pengelolaan kawasan ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Teras Cihampelas dibangun sebagai upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menata kawasan wisata Jalan Cihampelas yang sebelumnya dikenal padat, semrawut, dan dipenuhi pedagang kaki lima. Skywalk ini memiliki lebar 9 meter, panjang 450 meter, dan tinggi 4,6 meter dari permukaan jalan, dengan pembangunan dimulai pada tahun 2014 dan diresmikan pada Februari 2017 (Namira et al., 2022).

Selain itu, pembangunan Teras Cihampelas menelan anggaran sekitar Rp45 miliar pada tahap pertama dan Rp28 miliar pada tahap kedua, dengan total konstruksi baja mencapai 700 meter. Setelah mengalami keterlambatan, tahap kedua akhirnya diresmikan pada September 2023 (Oktaviano, 2024). Pembangunan kawasan ini diharapkan tidak hanya mengatasi kemacetan dan kesemrawutan, tetapi juga menyediakan ruang publik yang nyaman serta meningkatkan daya tarik wisata Kota Bandung.

Teras Cihampelas dirancang sebagai ikon ruang publik yang memadukan unsur estetika, kenyamanan, serta fungsi sosial dan ekonomi. Kawasan ini

dilengkapi dengan jalur ramah difabel, taman mini, bangku-bangku, instalasi seni, serta kios-kios pedagang kaki lima yang tertata rapi. Dengan konsep tersebut, Teras Cihampelas diharapkan menjadi destinasi wisata baru sekaligus wadah pengembangan ekonomi kreatif masyarakat lokal serta merepresentasikan citra Kota Bandung sebagai kota kreatif yang inklusif (Bagaskara, 2025).

Pada awal pengoperasiannya, Teras Cihampelas mendapatkan perhatian luas dan dipuji sebagai inovasi ruang publik yang mampu mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan estetika. Sebelum pandemi Covid-19, kawasan ini ramai dikunjungi wisatawan dan pedagang mampu memperoleh pendapatan hingga Rp1 juta per hari. Namun, pandemi Covid-19 membawa dampak signifikan terhadap keberlangsungan kawasan. Jumlah pengunjung menurun drastis, pendapatan pedagang merosot hingga Rp50.000–Rp200.000 per hari, dan sebagian pedagang memilih kembali berjualan di trotoar bawah karena lebih ramai dilalui masyarakat (Portal Bandung, 2025).

Empat tahun setelah beroperasi, kondisi Teras Cihampelas menunjukkan penurunan kualitas yang cukup signifikan. Fasilitas yang sebelumnya tertata kini mengalami kerusakan, seperti lampu yang tidak berfungsi, kios yang bocor saat hujan, vandalisme berupa coretan pada dinding, serta permasalahan kebersihan kawasan (Portal Bandung, 2025; Budiman & Ilhamdaniah, 2024). Penurunan jumlah pengunjung berdampak langsung pada pendapatan pedagang dan memicu kembali munculnya pedagang kaki lima di sepanjang trotoar Jalan Cihampelas (Kania Tasya et al., 2022).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan serius dalam pengelolaan pascapembangunan Teras Cihampelas. Kerusakan fasilitas, lemahnya pengawasan, serta minimnya pemeliharaan mencerminkan belum optimalnya mekanisme pengelolaan kawasan. Selain itu, rendahnya partisipasi pedagang dalam kegiatan pembinaan, seperti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, menunjukkan lemahnya keterlibatan aktor non-pemerintah dalam proses pengelolaan kawasan (Kania Tasya et al., 2022).

Pengelolaan Teras Cihampelas melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah, antara lain Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perhubungan, Dinas

Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Masing-masing OPD memiliki peran yang berbeda dalam mendukung keberlangsungan kawasan, mulai dari pemberdayaan pedagang, penataan kawasan, pengawasan ketertiban, hingga pemeliharaan infrastruktur. Namun, keterlibatan banyak aktor tersebut belum diiringi oleh koordinasi lintas sektor yang efektif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan Teras Cihampelas tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga dengan lemahnya tata kelola kolaboratif antaraktor. Keterlibatan masyarakat, pedagang, dan sektor swasta masih terbatas, sementara mekanisme komunikasi dan kerja sama belum terbangun secara berkelanjutan. Lemahnya relasi kolaboratif tersebut berdampak pada menurunnya fungsi ruang publik dan memunculkan wacana pembongkaran Teras Cihampelas yang kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan Teras Cihampelas menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pengelolaan kawasan, tetapi juga untuk memahami proses interaksi antaraktor, tingkat keterlibatan masing-masing pihak, serta hambatan dan peluang dalam membangun tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan tata kelola ruang publik perkotaan yang lebih efektif dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika *collaborative governance* dalam pengelolaan Teras Cihampelas di Kota Bandung, khususnya terkait interaksi antaraktor, proses kolaborasi, serta hambatan dan peluang yang muncul dalam praktik pengelolaan ruang publik perkotaan. Penelitian deskriptif digunakan untuk

menggambarkan fenomena sebagaimana terjadi di lapangan berdasarkan perspektif para pemangku kepentingan yang terlibat.

Lokasi penelitian berada di Teras Cihampelas, Kota Bandung, yang merupakan salah satu ruang publik perkotaan hasil pembangunan pemerintah daerah dan melibatkan berbagai aktor dalam pengelolaannya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya indikasi lemahnya tata kelola kolaboratif pascapembangunan, yang ditandai dengan menurunnya fungsi kawasan, kerusakan fasilitas, serta rendahnya partisipasi dan koordinasi antarpihak.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pengelolaan Teras Cihampelas yang melibatkan aktor pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat. Informan penelitian ditentukan secara purposive berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan kawasan. Informan terdiri atas perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perhubungan, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan perwakilan Koperasi Sejuta Teras Cihampelas, pedagang kaki lima (PKL), akademisi, media lokal, dan pengunjung, dengan total 17 informan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teoretis dan konteks kebijakan melalui buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Studi lapangan dilakukan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatif untuk mengamati kondisi fisik kawasan, aktivitas aktor, serta pola interaksi yang terjadi. Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi informan terkait pelaksanaan kolaborasi dalam pengelolaan Teras Cihampelas. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto, rekaman wawancara, dan dokumen kebijakan.

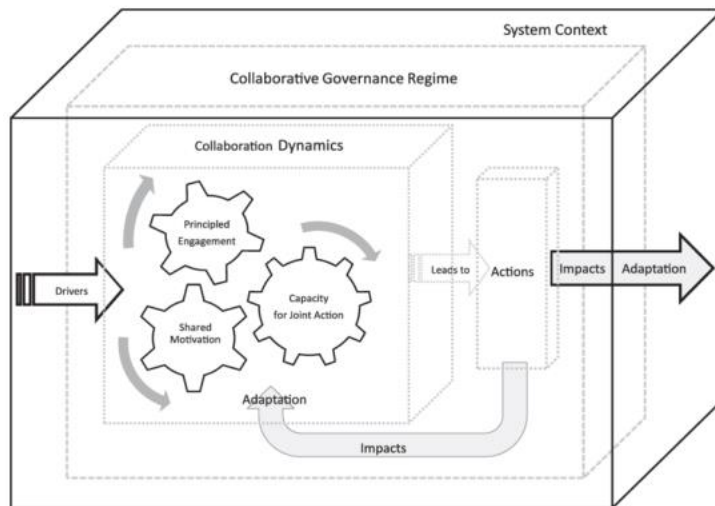
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data sesuai dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik untuk memudahkan pemahaman terhadap pola dan hubungan antaraktor. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara interpretatif untuk menjelaskan praktik *collaborative governance* dalam pengelolaan Teras Cihampelas serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian yang berjudul “Collaborative Governance dalam Pengelolaan Teras Cihampelas di Kota Bandung”, peneliti menggunakan kerangka teori Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Kerangka yang dikenal sebagai Collaborative Governance Regime (CGR) ini menjelaskan bahwa tata kelola kolaboratif merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik secara bersama-sama.

Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), keberhasilan *collaborative governance* dipengaruhi oleh beberapa komponen utama yang saling berkaitan, yaitu: (1) dinamika kolaborasi, (2) proses kolaboratif, dan (3) hasil atau dampak kolaborasi. Ketiga komponen tersebut menjadi kerangka analisis dalam menilai bagaimana kolaborasi antarpemangku kepentingan dibangun dan dijalankan dalam pengelolaan Teras Cihampelas.



Sumber: (Astuti et al., 2020)

Pertama, dinamika kolaborasi, yang mencakup unsur kepercayaan (trust), pemahaman bersama (shared understanding), serta komitmen antar aktor yang terlibat. Dinamika kolaborasi menjadi fondasi awal dalam collaborative governance, karena menentukan sejauh mana pemangku kepentingan mampu membangun hubungan kerja sama yang setara dan berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan Teras Cihampelas.

Kedua, proses kolaboratif, yang merujuk pada mekanisme interaksi, komunikasi, serta bentuk kerja sama yang terjalin antar pemangku kepentingan. Proses ini mencakup kegiatan dialog bersama, koordinasi lintas sektor, serta pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan Teras Cihampelas. Proses kolaboratif yang berjalan dengan baik memungkinkan setiap aktor berkontribusi secara aktif sesuai dengan perannya masing-masing.

Ketiga, hasil atau dampak kolaborasi, yang menunjukkan sejauh mana praktik collaborative governance mampu menghasilkan manfaat nyata, baik secara substantif maupun relasional. Dampak kolaborasi tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan pengelolaan kawasan, tetapi juga dari terbangunnya hubungan kemitraan yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan Teras Cihampelas.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menganalisis praktik collaborative governance dalam pengelolaan Teras Cihampelas di Kota Bandung dengan melihat bagaimana dinamika kolaborasi terbentuk,

bagaimana proses kolaboratif dijalankan, serta bagaimana hasil kolaborasi yang dihasilkan dalam pengelolaan ruang publik tersebut.

a. Dinamika Kolaborasi (Collaborative Dynamics)

Dinamika kolaborasi merupakan tahapan awal yang menentukan keberlangsungan collaborative governance, terutama dalam membangun kepercayaan, pemahaman bersama, dan komitmen antar pemangku kepentingan. Berdasarkan penelitian dalam pengelolaan Teras Cihampelas di Kota Bandung, dinamika kolaborasi dalam pengelolaan Teras Cihampelas belum berkembang secara optimal. Interaksi antar aktor lebih banyak terjadi dalam bentuk koordinasi administratif dibandingkan dialog kolaboratif yang berorientasi pada penyamaan tujuan pengelolaan kawasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) belum difasilitasi dalam suatu forum bersama yang bersifat rutin dan berkelanjutan. Setiap OPD menjalankan peran sesuai dengan kewenangannya masing-masing, namun tanpa mekanisme diskusi kolektif yang memungkinkan terjadinya pertukaran perspektif dan penyusunan visi bersama. Kondisi ini mengindikasikan bahwa shared understanding sebagai elemen penting dalam dinamika kolaborasi belum terbentuk secara kuat.

Selain itu, keterlibatan aktor non-pemerintah, khususnya pedagang kaki lima dan koperasi, masih terbatas. Dalam konteks dinamika kolaborasi, keterbatasan ini berdampak pada rendahnya rasa saling percaya (trust) dan komitmen bersama terhadap pengelolaan Teras Cihampelas. Dengan demikian, dinamika kolaborasi yang terbangun masih bersifat parsial dan belum mampu menjadi fondasi yang kokoh bagi praktik collaborative governance.

b. Proses Kolaboratif (Collaborative Actions)

Dinamika kolaborasi yang belum kuat berimplikasi pada proses kolaboratif yang dijalankan dalam pengelolaan Teras Cihampelas. Berdasarkan temuan dalam penelitian, proses kolaborasi antar pemangku kepentingan belum terintegrasi dalam satu pola kerja bersama yang

sistematis. Tindakan kolaboratif yang dilakukan masih bersifat sektoral dan bergantung pada peran masing-masing aktor tanpa adanya pembagian peran yang disepakati secara kolektif.

Pengelolaan kawasan, seperti pemeliharaan fasilitas, penataan pedagang, dan pengawasan kawasan, dilakukan secara terpisah oleh masing-masing OPD. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses kolaboratif belum didukung oleh mekanisme joint action yang menjadi ciri utama collaborative governance. Ketiadaan perencanaan bersama menyebabkan berbagai permasalahan di kawasan ditangani secara reaktif dan tidak berkelanjutan.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses kolaboratif belum melibatkan aktor di luar pemerintah dan pedagang secara signifikan. Keterbatasan keterlibatan sektor swasta, akademisi, dan media menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif yang diharapkan masih belum berjalan secara inklusif. Hal ini memperlihatkan bahwa proses kolaborasi dalam pengelolaan Teras Cihampelas masih berada pada tahap awal dan belum berkembang menjadi kemitraan yang sejajar antar aktor.

c. Hasil dan Dampak Kolaborasi (Collaborative Outcomes)

Dalam kerangka collaborative governance, hasil kolaborasi menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas proses kolaboratif yang telah berjalan. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Teras Cihampelas belum menunjukkan hasil kolaboratif yang optimal. Tujuan pengelolaan kawasan sebagai ruang publik belum sepenuhnya tercapai, tercermin dari menurunnya aktivitas kawasan serta belum optimalnya pemanfaatan fasilitas yang ada.

Secara relasional, hubungan antar pemangku kepentingan belum berkembang menjadi kemitraan jangka panjang yang adaptif. Pengelolaan kawasan masih didominasi oleh peran pemerintah, sementara aktor non-pemerintah belum diberdayakan secara maksimal dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil kolaborasi yang diharapkan, baik dalam bentuk peningkatan kualitas pengelolaan maupun penguatan hubungan antar aktor, belum tercapai secara menyeluruh.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa praktik *collaborative governance* dalam pengelolaan Teras Cihampelas masih menghadapi keterbatasan pada setiap tahapan kerangka CGR, mulai dari dinamika kolaborasi, proses kolaboratif, hingga hasil kolaborasi. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme kolaborasi yang lebih terstruktur agar pengelolaan kawasan dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan Teras Cihampelas di Kota Bandung belum berjalan secara optimal. Meskipun pengelolaan kawasan telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya organisasi perangkat daerah, praktik kolaborasi yang berlangsung masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam suatu mekanisme tata kelola kolaboratif yang kuat. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara tujuan awal pembangunan Teras Cihampelas sebagai ruang publik strategis dengan realitas pengelolaan di lapangan.

Berdasarkan kerangka *Collaborative Governance Regime* (CGR) dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh, temuan penelitian menunjukkan bahwa dimensi dinamika kolaborasi menjadi aspek yang paling lemah. Dinamika kolaborasi belum berkembang secara memadai akibat terbatasnya ruang dialog bersama, belum terbentuknya forum kolaborasi yang rutin, serta rendahnya tingkat kepercayaan dan keterbukaan antaraktor. Akibatnya, prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan kolektif belum terbangun secara optimal. Kelemahan pada dinamika kolaborasi tersebut berdampak langsung pada tindakan kolaboratif dan hasil pengelolaan kawasan. Program dan aktivitas pengelolaan Teras Cihampelas cenderung dilaksanakan berdasarkan kewenangan masing-masing aktor tanpa koordinasi terpadu, sehingga berbagai persoalan pengelolaan seperti penataan pedagang, pemeliharaan fasilitas, kebersihan, dan pengawasan kawasan belum ditangani secara sinergis. Selain itu, kolaborasi yang belum efektif juga menyebabkan dampak pengelolaan

kawasan belum signifikan dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kondisi kawasan masih terbatas.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan Teras Cihampelas terletak pada lemahnya dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan. Tanpa penguatan komunikasi, koordinasi, dan komitmen bersama, penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan ruang publik perkotaan seperti Teras Cihampelas sulit mencapai hasil yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Creswell, J. W. (2019). *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran)* (J. W. Creswell, Ed.). Penerbit Pustaka Belajar.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (L. J. Moleong, Ed.). PT Remaja Rosdakarya.

Qomariyah, E. (2023). *COLLABORATIVE GOVERNANCE* (E. Qomariyah, Ed.). SELARAS MEDIA KREASINDO.

Artikel Jurnal

Abidin As, Z. (2019). Sinergitas pembinaan dan penataan PKL di Kota Bandung. *Jurnal Caraka Prabhu*, 3(2).

Budiman, A., & Ilhamdaniah. (2024). Ruang publik Teras Cihampelas: simbol modernitas atau kegagalan urbanisme? *Jurnal Desain Lingkungan Binaan Indonesia*, 1(2), 207–229.

Cahyono, A. S. (2021). Implementasi collaborative governance dalam penanganan COVID-19. *Publiciana*, 13(1).

Kania Tasya, N., Nurasa, H., & Isnawaty, N. W. (2022). Evaluasi relokasi PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung. *JANE: Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 372–383.

Namira, M. F., Wipranata, B. I., & Tjung, L. J. (2022). EVALUASI DAN PENINGKATAN PENGELOLAAN SKYWALK SEBAGAI DESTINASI WISATA (STUDI KASUS: KAWASAN CIHAMPELAS, KOTA BANDUNG,

JAWA BARAT). Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa), <https://doi.org/10.24912/stupa.v3i2.12869>

Astuti, R. S., Warsono, & Rachim, A. (2020). *Collaborative governance dalam perspektif administrasi publik* (Disertasi). Universitas Diponegoro.

Sumber Terbuka

Bagaskara, B. (2025, July 11). Kilas Balik Riang di Teras Cihampelas hingga Dikunjungi Jokowi. Detik Jabar. https://www.detik.com/jabar/berita/d_8007024/kilas-balik-riang-di-teras-cihampelas-hingga-dikunjungi-jokowi

Oktaviano, T. (2024, November 11). Puluhan Miliar Anggaran Terserap, Proyek Teras Cihampelas Belum Rampung. Aktual.Com. <https://aktual.com/puluhan-miliar-anggaran-terserap-proyek-teras-cihampelas-belum-rampung/>

Portal Bandung. (2025, June 25). Wali Kota Bandung Akan Segera Hidupkan Kembali Perekonomian Pedagang Teras Cihampelas. Bandung.Go.Id. 211 <https://bandung.go.id/citizen/detail/5167/wali-kota-bandung-akan-segera-hidupkan-kembali-perekonomian-pedagang-teras-cihampelas-1750758710>